

PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI HUTAN GREEN LAWU DI DESA BERJO KECAMATAN NGARGOYOSO KARANGANYAR

Restik Bunga Widarizki¹, Yosafat Hermawan Trinugraha²

Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Sebelas Maret

Email: restikbunga@student.uns.ac.id, yosafathermawan@staff.uns.ac.id

Abstract

Community empowerment is an important effort to improve the capacity, independence, and welfare of communities, especially those living around forest areas. This study aims to analyze the role of stakeholders in empowering the Green Lawu Forest Farmer Group (KTH Green Lawu) in Berjo Village, Ngargoyoso District, Karanganyar Regency, and to identify the impacts and challenges faced by the group in the empowerment process. This study employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The informants consisted of administrators and members of KTH Green Lawu, Berjo Village Government, managers of Tahura KGPAA Mangkunagoro I, forestry extension officers, and Pertamina as a supporting stakeholder through its Corporate Social Responsibility (CSR) program. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that stakeholders play an important role in the empowerment process through facilitative, educational, technical, and representative functions. These roles were manifested through the provision of facilities, mentoring, training, opening access to networks, and support for productive business development. The empowerment process has had positive impacts on improving members' capacity, creating economic opportunities, strengthening group institutions, and increasing community awareness of environmental conservation. However, the group still faces several challenges, including limited human resources, uneven member participation, limited business capital, and dependence on external stakeholders. Therefore, the empowerment of KTH Green Lawu has progressed fairly well, but it is still at the capacity-building stage and has not fully achieved group independence.

Keywords: Community empowerment, stakeholders, forest farmer group.

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder dalam pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Green Lawu di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, serta mengidentifikasi dampak dan tantangan yang dihadapi kelompok dalam proses pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengurus dan anggota KTH Green Lawu, Pemerintah Desa Berjo, pengelola Tahura KGPAA Mangkunagoro I, penyuluh kehutanan, dan pihak Pertamina sebagai stakeholder pendukung melalui program CSR. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan melalui fungsi fasilitatif, edukasional, teknis, dan representatif. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan sarana, pendampingan, pelatihan, pembukaan akses jaringan, serta dukungan pengembangan usaha produktif. Pemberdayaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas anggota, terbukanya peluang ekonomi, penguatan kelembagaan kelompok, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Namun demikian, kelompok masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, partisipasi anggota yang belum merata, keterbatasan modal usaha, dan ketergantungan terhadap stakeholder eksternal. Dengan demikian, pemberdayaan KTH Green Lawu telah berjalan cukup baik, namun masih berada pada tahap penguatan kapasitas dan belum sepenuhnya mencapai kemandirian kelompok.

Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, Kelompok Tani Hutan, Stakeholder.

[[Submitted: 28 April 2026

[[Accepted: 19 Mei 2026

[[Published: 04 Juni 2026

10.30829/jisa.v%vi%i.29466

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perubahan sosial dan ekonomi. Melalui pemberdayaan, masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan mengenali potensi, mengatasi persoalan, serta mengembangkan sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Dalam konteks pembangunan pedesaan, pemberdayaan menjadi penting karena masih banyak masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap bantuan dari luar, baik dalam bentuk modal, pengetahuan, maupun akses pasar. Oleh sebab itu, proses pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga penguatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat.

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada kelompok tani hutan. Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan sebuah organisasi masyarakat yang terdiri dari petani warga negara Indonesia yang secara kolektif mengelola usaha di bidang kehutanan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan (Mekar Sari Eka Putri et al., 2023). Keberadaan kelompok tani hutan memiliki peran strategis, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berada di sekitar kawasan hutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan (Amilah, 2024). Namun dalam praktiknya, pengembangan kelompok tani hutan sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya kelembagaan, minimnya modal usaha, dan kurangnya akses terhadap jaringan kemitraan.

Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar karena berada di kawasan lereng Gunung Lawu. Kondisi geografis tersebut menjadikan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan kawasan hutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Di desa ini terdapat Kelompok Tani Hutan Green Lawu, yaitu kelompok masyarakat yang bergerak dalam kegiatan pemberdayaan berbasis kehutanan dan pengembangan usaha produktif.

Perkembangan KTH Green Lawu tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak. Dalam proses pemberdayaannya, kelompok ini memperoleh dukungan dari pemerintah desa, pengelola Tahura KGPA Mangkunagoro I, penyuluh kehutanan, serta pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan kolaborasi

multipihak agar tujuan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai (Bryson et al., 2015).

Meskipun demikian, keterlibatan stakeholder tidak selalu berjalan optimal. Dalam beberapa kasus, bantuan yang diberikan masih berorientasi pada program jangka pendek dan belum sepenuhnya mendorong kemandirian kelompok (Muslim, 2017). Selain itu, kemampuan internal kelompok dalam mengelola organisasi, mengembangkan usaha, dan memperluas jaringan juga masih menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat mampu mengelola dan melanjutkan proses pemberdayaan secara mandiri.

Teori Pengembangan Masyarakat (Community Development) menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat melalui peran fasilitatif, edukasional, teknis, dan representative (Ife & Tesoriero, 2008). Keempat peran tersebut diperlukan untuk membantu masyarakat mengembangkan kemampuan, memperoleh akses terhadap sumber daya, serta membangun posisi tawar dalam proses pembangunan. Teori ini relevan digunakan untuk melihat bagaimana peran stakeholder dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan pada KTH Green Lawu.

Penelitian yang telah dilakukan pada saat ini kebanyakan berfokus pada aspek ekonomi hasil hutan atau program perhutanan sosial. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Belinda Hastari dan Reri Yulianti pada tahun 2018 bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan bentuk pemanfaatan sumber daya hutan bukan kayu serta menghitung nilai ekonominya bagi masyarakat sekitar hutan yang berinteraksi dengan kawasan KPHL Kapuas Kahayan. (Hastari et al., 2018). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Bahruni pada tahun 2007 yang berfokus pada pengukuran dinamika nilai ekonomi total ekosistem hutan serta upaya mengharmoniskan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan hutan (Bahruni et al., 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Afriyanti pada tahun 2019 mengobservasi potensi skema perhutanan sosial sebagai salah satu strategi restorasi lahan gambut dengan mencermati kebijakan, praktik lokal di masyarakat, potensi ekonomi, serta kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan (Gunawan & Afriyanti, 2019).

Masih sedikit penelitian atau kajian yang berfokus pada peran dan pengaruh

stakeholder dalam proses pemberdayaan Kelompok Tani Hutan. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena memiliki nilai strategis dari segi teoritis maupun praktis. KTH yang berperan dalam konservasi hutan dan kesejahteraan anggota, tidak dapat berjalan sendiri tanpa *stakeholder* baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu penelitian tentang sejauh mana peran dan pengaruh *stakeholder* terhadap proses pemberdayaan menjadi relevan dan harus dilakukan. Penelitian ini akan berkontribusi dalam upaya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memecahkan atau mengerti suatu peristiwa dengan memasuki lingkungan atau berinteraksi dengan narasumber pada peristiwa tersebut secara langsung (Moleong, 2017). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi lapangan, pengalaman para informan, serta dinamika yang terjadi dalam proses pemberdayaan. Sementara itu, studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu objek tertentu, yaitu KTH Green Lawu sebagai kelompok tani hutan yang aktif menjalankan program pemberdayaan masyarakat di Desa Berjo.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Berjo, Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa Desa Berjo tersebut memiliki Kelompok Tani Hutan yang telah menjalankan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kehutanan, konservasi, dan usaha produktif dengan melibatkan berbagai *stakeholder*.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan mengetahui, memahami, dan terlibat dalam kegiatan yang diteliti (Sugiyono, 2019). Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan melalui proses observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan, yaitu pengurus dan anggota KTH Green Lawu, Pemerintah Desa Berjo, pengelola Tahura KGPAA Mangkunagoro I, penyuluh kehutanan, serta pihak Pertamina sebagai *stakeholder* pendukung melalui program CSR

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi

mengenai bentuk peran stakeholder, proses pemberdayaan, manfaat program, serta kendala yang dihadapi kelompok (Moleong, 2017). Untuk menjaga privasi identitas informan, artikel ini menyajikan data sebagai berikut:

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Jabatan/Status	Kode
1	Pengelola Kawasan Hutan Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro 1	DS
2	Penyuluh Kehutanan CDK Wilayah X	JP
3	Pemerintah Desa	WB
4	Pihak Perusahaan	F
5	Ketua KTH	MR
6	Anggota KTH	MT

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas kelompok, kondisi usaha yang dijalankan, serta interaksi antar pihak yang terlibat (Moleong, 2017). Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa foto kegiatan, arsip kelompok, profil desa, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian (Moleong, 2017).

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi merupakan pendekatan multimode oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data (Hadi, 2016). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2023). Dengan teknik tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan gambaran yang jelas mengenai peran stakeholder dalam pemberdayaan KTH Green Lawu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Pembentukan Kelompok Tani Hutan Green Lawu

Kelompok Tani Hutan (KTH) Green Lawu merupakan kelompok masyarakat yang berada di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Kelompok ini dibentuk sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi kawasan sekitar hutan secara produktif dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kehadiran kelompok ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan lereng Gunung Lawu.



Gambar 1. Proses wawancara informan

Pembentukan KTH Green Lawu dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal masyarakat sekitar hutan. Melalui kelompok ini, masyarakat didorong untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang selaras dengan prinsip konservasi. Pemerintah Desa Berjo mendukung pembentukan kelompok karena dinilai sejalan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan warga.

Dalam perkembangannya, KTH Green Lawu menjalankan beberapa kegiatan usaha seperti budidaya jamur, budidaya angrek, dan promosi hasil usaha lokal. Program tersebut didukung oleh berbagai stakeholder, termasuk bantuan greenhouse melalui CSR Pertamina. Selain memberi manfaat ekonomi, kelompok ini juga menjadi ruang belajar dan kerja sama antaranggota. KTH Green Lawu menunjukkan perkembangan positif sebagai kelompok masyarakat berbasis kehutanan. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek sumber daya manusia dan kemandirian usaha, kelompok ini memiliki potensi untuk terus berkembang sebagai model pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Peran Stakeholder dalam Proses Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Green Lawu

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Green Lawu tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan berbagai *stakeholder*. *Stakeholder*

mencakup semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam program pemberdayaan, termasuk mereka yang aktif dalam mendukung, memfasilitasi, dan mengarahkan proses tersebut (Romadhona, 2025). Dalam pemberdayaan petani khususnya pada kelompok tani hutan, *stakeholder* memiliki peran yang beraneka ragam dan saling menguatkan. Beberapa peran utama *stakeholder* yang diidentifikasi adalah sebagai berikut: pertama, *stakeholder* sebagai pembuat kebijakan (*policy creator*) yang menetapkan regulasi dan program strategis untuk keberlangsungan dan pengembangan sektor pertanian (Lailia et al., 2021) Dalam penelitian ini, stakeholder yang memiliki peran penting meliputi Pemerintah Desa Berjo, pengelola Tahura K.G.P.A.A Mangkunagoro I, penyuluh kehutanan, serta pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina. Masing-masing stakeholder memiliki bentuk dukungan yang berbeda sesuai kapasitas, kewenangan, dan sumber daya yang dimiliki.

1. Peran Pemerintah Desa Berjo

Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai lembaga pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Dalam pemberdayaan KTH Green Lawu, pemerintah desa berperan memberikan dukungan kelembagaan, memfasilitasi kegiatan kelompok, serta menciptakan iklim sosial yang mendukung keberadaan kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa memandang bahwa keberadaan KTH Green Lawu sejalan dengan tujuan pembangunan desa, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu informan menyampaikan:

“Pemerintah desa ikut mendukung karena program ini sejalan dengan program desa untuk mensejahterakan masyarakat” (WB, 9/12/25).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa menempatkan kelompok sebagai mitra pembangunan desa. Dukungan seperti ini penting karena kelompok masyarakat sering membutuhkan legitimasi dan pengakuan dari pemerintah setempat agar lebih mudah berkembang.

Selain itu, pemerintah desa juga memberikan dukungan fasilitas berupa penggunaan kantor desa untuk kegiatan rapat, diskusi, dan pelatihan. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah desa juga memberikan akses pemanfaatan aset desa, seperti area wisata, untuk kegiatan promosi dan pameran produk kelompok. Dukungan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya mendukung secara administratif, tetapi juga secara praktis. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan

pemerintah desa masih dapat ditingkatkan, terutama dalam integrasi program pemberdayaan kelompok dengan perencanaan pembangunan desa. Apabila kelompok lebih banyak dilibatkan dalam agenda ekonomi desa, maka dampak pemberdayaan berpotensi lebih besar.

2. Peran Pengelola Tahura KGPAA Mangkunagoro I

Pengelola Tahura memiliki posisi penting karena KTH Green Lawu berada di wilayah yang memiliki keterkaitan dengan kawasan hutan. Tahura berperan sebagai fasilitator utama yang menjembatani kepentingan konservasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Berdasarkan hasil wawancara, pihak Tahura menyampaikan:

“Kalau KTH Green Lawu ini jalan sendiri ya sulit berkembang. Maka dari itu kami dari Tahura berusaha memfasilitasi supaya kelompok ini bisa terhubung dengan pihak lain.” (DS, 9/12/25).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Tahura menyadari keterbatasan kelompok dalam mengakses jaringan yang lebih luas. Oleh karena itu, Tahura menjalankan fungsi penghubung dengan stakeholder lain, seperti penyuluh kehutanan, perguruan tinggi, maupun sektor swasta.

Selain sebagai penghubung, Tahura juga memberikan pembinaan agar kegiatan kelompok tetap sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan. Hal ini penting karena pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan harus tetap memperhatikan keberlanjutan kawasan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak fungsi ekologis hutan.

Dalam praktiknya, Tahura juga menjadi pihak yang cukup aktif mendorong munculnya inovasi kegiatan kelompok, seperti budidaya anggrek endemik dan usaha berbasis konservasi. Peran ini menunjukkan bahwa lembaga pengelola kawasan hutan tidak hanya berfungsi menjaga kawasan, tetapi juga dapat menjadi motor pemberdayaan masyarakat.

3. Peran Penyuluh Kehutanan

Penyuluh kehutanan memiliki peran yang dekat dengan masyarakat karena terlibat langsung dalam proses pendampingan lapangan. Dalam penelitian ini, penyuluh kehutanan berperan dalam memberikan pembinaan, konsultasi teknis, serta membantu kelompok dalam perencanaan kegiatan. Informan dari penyuluh kehutanan menyampaikan:

“Kalau menurut saya, peran stakeholder itu memang sangat penting, karena kelompok tani tidak bisa dibiarkan jalan sendiri. Harus ada yang mendampingi, memberi arahan, dan membantu membuka akses ke pihak lain.” (JP, 29/12/25).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyuluh melihat pendampingan sebagai kebutuhan utama kelompok. Banyak kelompok masyarakat yang memiliki semangat tinggi, tetapi belum memiliki pengalaman manajemen maupun keterampilan teknis yang memadai. Dalam kondisi tersebut, penyuluh menjadi pendamping yang membantu mengarahkan kelompok.

Penyuluh kehutanan juga berperan dalam meningkatkan kapasitas anggota kelompok melalui pelatihan budidaya, penguatan organisasi, dan motivasi kelompok. Selain itu, penyuluh membantu komunikasi antara kelompok dengan pihak luar sehingga kebutuhan kelompok dapat tersampaikan dengan lebih baik. Penyuluh memiliki peran penting karena keberadaan mereka menjembatani kebijakan pemerintah dengan realitas di lapangan. Penyuluh memahami kondisi masyarakat sekaligus memahami arah program pemerintah, sehingga mampu menerjemahkan kebijakan menjadi kegiatan yang lebih aplikatif.

4. Peran Pertamina melalui Program CSR

Pihak swasta melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) juga memiliki kontribusi penting dalam pemberdayaan KTH Green Lawu. Dalam penelitian ini, Pertamina memberikan dukungan berupa bantuan sarana, pendanaan program, serta monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan. Informan dari pihak Pertamina menyampaikan:

“Dari Pertamina, kami berupaya mendukung melalui program CSR supaya KTH Green Lawu bisa berkembang, usahanya berjalan, dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat sekitar.” (F, 8/12/25).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa CSR diarahkan tidak hanya sebagai bantuan sesaat, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang berorientasi pada pengembangan masyarakat. Dukungan dari Pertamina menjadi salah satu faktor yang mempercepat perkembangan kelompok, terutama dalam pengadaan fasilitas usaha.

Salah satu bentuk dukungan nyata adalah pembangunan greenhouse anggrek yang dimanfaatkan untuk budidaya anggrek endemik Gunung Lawu dan anggrek nusantara. Selain itu, dukungan juga diberikan untuk pengembangan budidaya jamur dan kegiatan

usaha lainnya.

Keterlibatan pihak swasta menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat akan berjalan lebih maksimal saat melibatkan berbagai pihak. Akan tetapi program dari CSR harus dirancang berkelanjutan dan meminimalisir efek ketergantungan kelompok terhadap bantuan dari pihak perusahaan.

5. Sinergi Antar Stakeholder

Berdasarkan hasil penelitian, peran stakeholder pada KTH Green Lawu tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi. Pemerintah desa mendukung dari sisi kelembagaan lokal, Tahura membuka akses jaringan dan menjaga aspek konservasi, penyuluh kehutanan memberikan pendampingan teknis, sedangkan Pertamina mendukung dari sisi sarana dan pendanaan.

Sinergi ini menjadi kekuatan utama dalam proses pemberdayaan kelompok. Tanpa kolaborasi tersebut, perkembangan kelompok kemungkinan akan berjalan lebih lambat karena masyarakat memiliki keterbatasan sumber daya internal. Dengan adanya dukungan multipihak, kelompok memperoleh kesempatan berkembang lebih besar.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antar stakeholder masih perlu ditingkatkan. Beberapa program masih berjalan secara parsial dan bergantung pada inisiatif pihak tertentu. Para stakeholder perlu merancang pola kerja sama yang lebih terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemandirian kelompok.

Implementasi Peran Fasilitatif, Edukasional, Teknis, dan Representatif dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Green Lawu

Pemberdayaan merupakan proses pembangunan manusia dan masyarakat secara menyeluruh yang mengandung makna mengembangkan kemampuan, meningkatkan kemandirian, menumbuhkan keswadayaan, serta memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap berbagai bentuk tekanan dalam seluruh bidang kehidupan (Harahap, 2018). Analisis pemberdayaan pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Green Lawu dalam penelitian ini menggunakan perspektif Teori Pengembangan Masyarakat (Community Development) menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero yang menekankan empat peran utama dalam proses pemberdayaan, yaitu peran fasilitatif, edukasional, teknis, dan representative (Ife & Tesoriero, 2008). Keempat peran tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kontribusi stakeholder dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendorong kemandirian kelompok.

1. Implementasi Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif berkaitan dengan upaya membuka akses masyarakat terhadap sumber daya, memberikan dukungan sarana, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan kelompok berkembang. Dalam pemberdayaan KTH Green Lawu, peran ini menjadi salah satu bentuk dukungan yang paling terlihat.

Pemerintah Desa Berjo memberikan fasilitas berupa penggunaan kantor desa untuk kegiatan rapat, diskusi, dan pelatihan. Selain itu, kelompok juga diberikan kesempatan memanfaatkan aset desa sebagai tempat promosi hasil usaha. Dukungan tersebut membantu kelompok dalam menjalankan kegiatan tanpa harus menanggung biaya tambahan untuk sarana pertemuan maupun promosi.

Tahura juga menjalankan peran fasilitatif dengan membuka akses kelompok kepada pihak lain. Informan dari Tahura menyampaikan:

“Kami bantu menghubungkan KTH dengan stakeholder lain, seperti CSR Pertamina, perguruan tinggi, sama pihak lain yang mau masuk program.” (DS, 9/12/25).

Hal ini menunjukkan bahwa fasilitasi tidak selalu berbentuk bantuan fisik, tetapi juga berupa akses jaringan dan peluang kerja sama. Dalam proses pemberdayaan, akses terhadap relasi eksternal sering kali menjadi modal penting bagi perkembangan kelompok.

Di sisi lain, pihak Pertamina memberikan fasilitasi berupa dukungan pendanaan dan sarana usaha melalui program CSR. Dukungan tersebut memperkuat kapasitas kelompok dalam mengembangkan unit usaha yang sebelumnya sulit dilakukan secara mandiri.

2. Implementasi Peran Edukasional

Peran edukasional berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, perubahan pola pikir, serta penguatan kapasitas anggota kelompok melalui proses belajar (Ife & Tesoriero, 2008). Dalam penelitian ini, peran edukasional terlihat melalui berbagai kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan yang dilakukan stakeholder.

Penyuluh kehutanan menjadi salah satu pihak yang paling aktif menjalankan fungsi edukasional. Penyuluh memberikan pembinaan mengenai pengelolaan kelompok, pengembangan usaha, dan pemanfaatan sumber daya hutan. Selain itu, penyuluh juga berperan dalam memberikan motivasi kepada anggota kelompok agar tetap aktif menjalankan kegiatan. Informan dari penyuluh kehutanan menyampaikan:

“Kelompok tani itu perlu didampingi terus. Kalau ada arahan dan pendampingan, biasanya mereka lebih semangat dan lebih jelas arah kegiatannya.” (JP, 29/12/25).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa edukasi tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan teknis, tetapi juga pembentukan motivasi dan arah kelompok. Banyak kelompok masyarakat yang sebenarnya memiliki potensi, namun membutuhkan dorongan dan arahan agar lebih percaya diri.

Selain penyuluh, stakeholder lain juga memberikan pelatihan mengenai budidaya jamur, pemasaran produk, pembuatan pestisida alami, dan pengelolaan greenhouse anggrek. Pelatihan tersebut memberi tambahan kemampuan praktis bagi anggota kelompok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran edukasional berdampak pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap kawasan hutan. Masyarakat mulai memahami bahwa hutan tidak hanya bernilai dari hasil kayu, tetapi juga memiliki potensi ekonomi lain yang dapat dimanfaatkan secara lestari. Kendala dari proses edukasi adalah belum meratanya proses transfer ilmu dikarenakan keaktifan sebagian anggota yang masih kurang.

3. Implementasi Peran Teknis

Peran teknis berkaitan dengan bantuan keterampilan praktis, pendampingan operasional, serta penyediaan sarana yang mendukung kegiatan usaha kelompok. Dalam penelitian ini, implementasi peran teknis cukup terlihat pada berbagai program yang dijalankan KTH Green Lawu.

Salah satu bentuk dukungan teknis adalah pembangunan greenhouse anggrek yang didukung melalui CSR Pertamina. Fasilitas ini menjadi sarana penting dalam budidaya anggrek endemik Gunung Lawu maupun anggrek nusantara. Selain itu, kelompok juga memperoleh dukungan teknis dalam budidaya jamur dan kegiatan usaha lainnya. Informan dari pihak Pertamina menyampaikan:

“Bentuknya berupa bantuan pendanaan untuk pengembangan kegiatan kelompok, seperti pembangunan greenhouse anggrek, budidaya jamur, dan program usaha lainnya.” (F, 8/12/25)

Di sisi lain, penyuluh kehutanan membantu kelompok dalam aspek teknis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pendampingan tersebut membuat anggota

kelompok lebih mudah menjalankan program karena memperoleh arahan langsung di lapangan.

4. Implementasi Peran Representatif

Peran representatif berkaitan dengan kemampuan stakeholder mewakili kepentingan kelompok, membangun jaringan, serta memperjuangkan akses kelompok terhadap pihak luar. Dalam konteks KTH Green Lawu, peran ini cukup dominan dilakukan oleh Tahura dan pemerintah desa.

Pengelola Tahura menjadi pihak yang aktif mengenalkan kelompok kepada stakeholder lain. Melalui jaringan tersebut, KTH Green Lawu memperoleh akses terhadap program pelatihan, bantuan CSR, dan peluang kerja sama lainnya. Informan dari Tahura menyampaikan:

“Kalau jalan sendiri ya sulit berkembang. Maka dari itu kami bantu hubungkan dengan pihak luar supaya kelompok punya dukungan dan bisa berkembang perlahan.” (DS, 9/12/25).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa representasi menjadi penting karena kelompok masyarakat umumnya belum memiliki jaringan yang kuat. Kehadiran lembaga yang memiliki otoritas lebih besar dapat membantu memperluas peluang kelompok.

Pemerintah desa juga berperan representatif melalui dukungan sosial dan administratif. Keberadaan pemerintah desa sebagai pihak yang mengakui dan mendukung kelompok membuat posisi KTH Green Lawu lebih kuat di tengah masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan representasi internal kelompok masih perlu diperkuat. Kelompok belum sepenuhnya mampu membangun jaringan secara mandiri tanpa bantuan stakeholder. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menjadi hambatan bagi kemandirian kelompok.

5. Sintesis Implementasi Empat Peran

Secara keseluruhan, implementasi empat peran pemberdayaan menurut Teori Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero telah terlihat dalam proses pemberdayaan KTH Green Lawu. Peran fasilitatif dan representatif tampak lebih dominan karena banyak berkaitan dengan akses bantuan, jaringan, dan dukungan kelembagaan. Sementara itu, peran edukasional dan teknis berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas anggota kelompok.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan pada KTH Green Lawu telah berjalan cukup baik dalam tahap penguatan kapasitas (*capacity building*). Kelompok memperoleh dukungan, pengetahuan, keterampilan, serta akses yang lebih luas dibanding sebelumnya.

Namun demikian, proses pemberdayaan belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian kelompok. Hal ini terlihat dari masih kuatnya ketergantungan terhadap stakeholder dalam aspek modal, pendampingan, dan akses jaringan. Oleh karena itu, tahap selanjutnya yang perlu diperkuat adalah pengembangan kapasitas internal kelompok agar mampu mengelola kegiatan secara mandiri dan berkelanjutan.

Dampak Pemberdayaan terhadap Kelompok Tani Hutan Green Lawu

1. Dampak Ekonomi

Salah satu dampak yang paling dirasakan dari kegiatan pemberdayaan adalah terbukanya peluang ekonomi baru bagi anggota kelompok. Melalui berbagai kegiatan usaha seperti budidaya jamur, budidaya anggrek, penjualan tanaman hias, serta kegiatan promosi produk lokal, anggota kelompok memperoleh tambahan pendapatan di luar pekerjaan utama mereka.



Gambar 2. Green House salah satu perwujudan program pemberdayaan

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa melihat bahwa keberadaan KTH Green Lawu memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu informan menyampaikan:

“Program ini kami dukung karena diharapkan bisa memberi dampak ekonomi dan sosial bagi warga.” (WB, 9/12/25).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal kelompok ini memang diarahkan untuk memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat. Walaupun belum seluruh anggota menjadikan kegiatan kelompok sebagai sumber pendapatan utama, keberadaan usaha produktif yang dijalankan kelompok telah membuka kesempatan ekonomi baru.

“Lumayan buat nambah uang belanja. Kadang ada hasil dari jamur atau

tanaman yang dijual.” (MT, 9/12/25).

Program budidaya jamur, misalnya, menjadi salah satu usaha yang cukup potensial karena dapat dijalankan dengan modal yang relatif terjangkau dan memiliki peluang pasar. Sementara itu, budidaya anggrek memberikan nilai tambah karena berkaitan dengan tanaman hias yang memiliki pasar khusus dan potensi wisata edukasi.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak ekonomi masih belum merata kepada seluruh anggota kelompok. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat keaktifan anggota yang berbeda-beda, keterbatasan pemasaran, dan skala usaha yang masih berkembang. Dengan demikian, dampak ekonomi sudah mulai terlihat, tetapi masih perlu diperkuat agar lebih berkelanjutan.

2. Dampak Sosial

Selain ekonomi, pemberdayaan juga memberikan dampak sosial yang cukup penting. Keberadaan KTH Green Lawu menjadi ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi, berdiskusi, dan bekerja sama dalam kegiatan produktif. Kelompok ini tidak hanya menjadi wadah usaha, tetapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan sosial antaranggota masyarakat.

“Kalau dari sisi sosial, warga jadi lebih sering kumpul dan komunikasi. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri.” (MR, 9/12/25).

Melalui kegiatan rutin, anggota kelompok belajar untuk bekerja secara kolektif, berbagi pengalaman, dan menyelesaikan persoalan bersama. Dalam masyarakat desa, hal seperti ini penting untuk memperkuat solidaritas sosial dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap kelompok. Informan dari penyuluh kehutanan menyampaikan:

“Kalau ada arahan dan pendampingan, biasanya mereka lebih semangat dan lebih jelas arah kegiatannya.” (JP, 29/12/25).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan kelompok tidak hanya berdampak pada aspek materi, tetapi juga meningkatkan semangat dan kepercayaan diri anggota. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai, partisipasi sosial cenderung meningkat. Selain itu, kelompok juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk lebih aktif mengikuti kegiatan desa maupun kegiatan bersama stakeholder lain. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan keterlibatan sosial masyarakat dalam pembangunan lokal.

3. Dampak terhadap Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Salah satu tujuan utama pemberdayaan adalah meningkatkan kapasitas masyarakat, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan mengelola organisasi (Ife & Tesoriero, 2008). Berdasarkan hasil penelitian, anggota KTH Green Lawu memperoleh tambahan kapasitas melalui berbagai pelatihan dan pendampingan yang diberikan stakeholder.

Pelatihan budidaya jamur, budidaya anggrek, pemasaran produk, pengelolaan kelompok, serta pemanfaatan sumber daya alam menjadi sarana pembelajaran bagi anggota kelompok. Sebelumnya, sebagian anggota belum memiliki pengalaman dalam kegiatan usaha produktif maupun pengelolaan organisasi kelompok.

Peningkatan kapasitas juga terlihat dari semakin terbukanya wawasan anggota kelompok terhadap peluang usaha dan pentingnya kerja sama. Masyarakat mulai memahami bahwa potensi desa dan kawasan hutan dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi yang legal dan berkelanjutan.

4. Dampak terhadap Kelembagaan Kelompok

Pemberdayaan yang dilakukan juga memberi dampak pada penguatan kelembagaan KTH Green Lawu. Sebelum adanya pendampingan dan dukungan stakeholder, kelompok masyarakat cenderung berjalan secara informal dan belum memiliki sistem organisasi yang jelas. Seiring perkembangan program, kelompok mulai memiliki struktur kepengurusan, pembagian tugas, serta kegiatan yang lebih terarah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya berbicara soal ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat mampu membangun organisasi yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Kelompok yang memiliki kelembagaan kuat akan lebih mudah mengakses bantuan, menjalin kerja sama, dan mengembangkan usaha. Informan dari Tahura menyampaikan:

“Kalau jalan sendiri ya sulit berkembang. Maka dari itu kami bantu hubungkan dengan pihak luar supaya kelompok punya dukungan dan bisa berkembang pelan-pelan.” (DS, 9/12/25).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan kelompok juga dipengaruhi oleh kemampuan menjalin relasi dengan pihak luar. Semakin kuat jaringan kelompok, maka semakin besar peluang kelompok untuk berkembang.

5. Dampak terhadap Kesadaran Lingkungan

Sebagai kelompok yang berada di sekitar kawasan hutan, pemberdayaan KTH Green Lawu juga memberi dampak terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan khususnya kawasan hutan. Masyarakat mulai memahami bahwa kelestarian hutan berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, terutama dalam menjaga sumber air, keseimbangan alam, dan keberlanjutan usaha berbasis alam.

Kegiatan budidaya anggrek endemik Gunung Lawu menjadi contoh bagaimana konservasi dapat dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi. Masyarakat tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga ikut menjaga dan melestarikannya. Selain itu, masyarakat mulai memahami bahwa pemanfaatan hutan tidak harus dilakukan melalui penebangan atau eksploitasi langsung. Potensi wisata, tanaman hias, dan hasil hutan bukan kayu menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan.

6. Analisis Dampak Pemberdayaan

Pemberdayaan yang dilakukan pada KTH Green Lawu telah memberi perubahan positif bagi kelompok dan masyarakat. Perubahan tersebut tampak pada bertambahnya peluang ekonomi, meningkatnya kapasitas anggota, menguatnya hubungan sosial, berkembangnya kelembagaan, serta tumbuhnya kesadaran lingkungan.

Namun demikian, dampak tersebut masih berada pada tahap perkembangan dan belum sepenuhnya optimal. Sebagian kegiatan usaha masih berskala kecil, partisipasi anggota belum merata, dan ketergantungan terhadap dukungan stakeholder masih cukup kuat.

Dalam perspektif Jim Ife dan Frank Tesoriero, kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan telah berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*), tetapi belum sepenuhnya mencapai tahap kemandirian (*community control*). Artinya, masyarakat sudah mengalami kemajuan, namun masih membutuhkan penguatan lebih lanjut agar mampu mengelola kegiatan secara mandiri dan berkelanjutan.

Secara umum, dampak pemberdayaan KTH Green Lawu dapat dinilai positif karena telah membuka jalan bagi masyarakat untuk berkembang. Tantangan berikutnya adalah memastikan agar perubahan tersebut tidak berhenti pada program sementara, tetapi dapat menjadi proses jangka panjang yang memperkuat kemandirian kelompok dan kesejahteraan masyarakat.

Kendala dan Tantangan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Green Lawu

Meskipun proses pemberdayaan pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Green Lawu telah memberikan berbagai dampak positif, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan. Kendala tersebut berasal dari faktor internal kelompok maupun faktor eksternal yang memengaruhi keberlanjutan program.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Sebagian anggota kelompok memiliki usia yang tidak lagi muda, sehingga kemampuan dalam menerima inovasi, mengembangkan usaha, dan mengikuti perkembangan teknologi masih terbatas. Selain itu, tingkat partisipasi anggota juga belum merata karena sebagian anggota memiliki pekerjaan utama masing-masing, sehingga tidak selalu aktif dalam setiap kegiatan kelompok.

Dalam aspek ekonomi, kelompok masih menghadapi keterbatasan modal usaha dan pemasaran produk. Beberapa kegiatan produktif seperti budidaya anggrek telah berjalan, namun belum berkembang secara maksimal karena akses pasar yang masih terbatas dan skala usaha yang masih kecil.

Tantangan lainnya adalah masih adanya ketergantungan terhadap stakeholder eksternal, terutama dalam hal bantuan sarana, pendampingan, dan akses program. Di satu sisi, dukungan tersebut membantu perkembangan kelompok, namun di sisi lain dapat menghambat proses kemandirian apabila kelompok belum mampu membangun inisiatif secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas internal kelompok, peningkatan partisipasi anggota, regenerasi anggota muda, serta pengembangan usaha yang lebih mandiri agar KTH Green Lawu dapat berkembang secara berkelanjutan.

Analisis Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Green Lawu dalam Perspektif Teori Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) Jim Ife dan Frank Tesoriero

Pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Green Lawu menunjukkan bahwa proses pembangunan berbasis masyarakat memerlukan keterlibatan banyak pihak, waktu yang cukup panjang, serta kemampuan kelompok dalam memanfaatkan peluang yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian, berbagai program yang dijalankan telah memberi dampak positif terhadap peningkatan kapasitas anggota, pengembangan usaha kelompok, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam menggunakan perspektif Teori Pengembangan Masyarakat (*Community*

Development) menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, proses pemberdayaan tersebut masih menyisakan beberapa catatan kritis.

Jim Ife dan Frank Tesoriero memandang pemberdayaan sebagai proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengontrol kehidupan, menentukan keputusan, dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Dengan kata lain, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari banyaknya bantuan atau kegiatan yang diberikan, tetapi dari sejauh mana masyarakat mampu menjadi subjek utama dalam proses pembangunan.

1. Dominasi Peran Eksternal dalam Proses Pemberdayaan

Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan KTH Green Lawu cukup banyak ditopang oleh peran stakeholder eksternal, seperti pemerintah desa, pengelola Tahura, penyuluh kehutanan, dan CSR Pertamina. Dukungan tersebut meliputi bantuan fasilitas, pendampingan, akses jaringan, pelatihan, hingga dukungan modal usaha.

Di satu sisi, kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi stakeholder berjalan cukup baik. Kelompok masyarakat memperoleh dukungan yang sebelumnya sulit diakses secara mandiri. Namun di sisi lain, dominasi peran eksternal juga menunjukkan bahwa inisiatif internal kelompok belum sepenuhnya kuat. Dalam perspektif Teori Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih berada pada tahap transisi menuju berdaya, karena kemampuan mengakses sumber daya secara mandiri belum sepenuhnya terbentuk.

2. Pemberdayaan Masih Berada pada Tahap *Capacity Building*

Jika dilihat dari capaian program, KTH Green Lawu telah mengalami peningkatan kapasitas dalam berbagai aspek. Anggota kelompok memperoleh pengetahuan baru, keterampilan usaha, pengalaman organisasi, dan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak. Hal ini merupakan indikator penting bahwa proses pemberdayaan telah berjalan.

Namun demikian, peningkatan kapasitas tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemandirian kelompok. Beberapa unit usaha masih membutuhkan bantuan sarana dan pendampingan. Selain itu, keputusan dalam kelompok juga masih banyak dipengaruhi oleh stakeholder pendamping. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan KTH Green Lawu masih berada pada tahap *capacity building*, yaitu tahap penguatan kapasitas masyarakat melalui pengetahuan, keterampilan, dan dukungan

kelembagaan. Tahap ini penting, tetapi belum menjadi tujuan akhir pemberdayaan. Dalam konsep Teori Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, tahap lanjutan yang perlu dicapai adalah *community control*, yaitu kondisi ketika masyarakat mampu mengelola organisasi, mengambil keputusan, dan menentukan arah pengembangannya secara mandiri.

3. Partisipasi Internal Kelompok Belum Merata

Aspek lain yang menjadi catatan kritis adalah partisipasi anggota kelompok yang belum merata. Dalam pelaksanaan kegiatan, masih terdapat perbedaan tingkat keaktifan antaranggota. Sebagian anggota terlibat aktif dalam kegiatan usaha dan rapat kelompok, sementara sebagian lain masih pasif.

Dalam perspektif pemberdayaan, partisipasi merupakan unsur utama karena masyarakat harus terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Jika partisipasi hanya bertumpu pada segelintir orang, maka keberlanjutan kelompok menjadi rentan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasa memiliki terhadap kelompok belum sepenuhnya tumbuh secara merata.

4. Pemberdayaan Telah Mendorong Perubahan Pola Pikir

Meskipun masih terdapat berbagai keterbatasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan berhasil mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap hutan dan potensi lokal. Masyarakat mulai memahami bahwa kawasan hutan tidak hanya bernilai dari kayu atau lahan, tetapi juga memiliki potensi ekonomi lain yang dapat dikembangkan secara lestari.

Perubahan pola pikir ini merupakan capaian penting dalam pemberdayaan. Menurut Teori Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, pemberdayaan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kesadaran kritis masyarakat dalam melihat potensi dan persoalan di lingkungannya.

Dalam konteks KTH Green Lawu, kesadaran tersebut terlihat dari berkembangnya usaha budidaya anggrek, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi. Artinya, proses pemberdayaan telah menghasilkan transformasi sosial meskipun belum sepenuhnya selesai.

5. Temuan Penelitian

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, pemberdayaan KTH Green Lawu dapat dikatakan berhasil pada tahap awal hingga menengah, yaitu meningkatkan kapasitas

masyarakat, membuka akses sumber daya, dan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif. Keberhasilan tersebut didukung oleh kolaborasi stakeholder yang cukup kuat.

Namun demikian, tujuan akhir pemberdayaan berupa kemandirian kelompok belum sepenuhnya tercapai. Ketergantungan terhadap stakeholder eksternal, keterbatasan SDM, partisipasi yang belum merata, dan kelembagaan yang masih perlu diperkuat menjadi indikator bahwa kelompok masih berada dalam proses berkembang.

Dengan demikian, pemberdayaan KTH Green Lawu dapat dipahami sebagai proses yang sedang berjalan, bukan hasil akhir yang telah selesai. Keberhasilan saat ini perlu dilihat sebagai fondasi untuk menuju tahap berikutnya, yaitu kemandirian yang lebih kuat.

6. Implikasi bagi Pengembangan Program ke Depan

Agar pemberdayaan mencapai tahap yang lebih matang, fokus program ke depan perlu berubah dari sekadar pemberian bantuan menuju penguatan kapasitas internal kelompok. Stakeholder tetap dibutuhkan, tetapi perannya perlu diarahkan sebagai pendamping strategis, bukan aktor utama.

Kelompok perlu diperkuat dalam aspek kepemimpinan, regenerasi anggota muda, manajemen usaha, pemasaran produk, dan kemampuan membangun jaringan secara mandiri. Jika hal tersebut dilakukan secara konsisten, maka KTH Green Lawu berpeluang berkembang menjadi kelompok tani hutan yang benar-benar mandiri dan berkelanjutan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Green Lawu menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan kelompok. Stakeholder yang terlibat meliputi Pemerintah Desa Berjo, pengelola Tahura K.G.P.A.A Mangkunagoro I, Penyuluh Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X, serta pihak swasta melalui program CSR Pertamina. Masing-masing pihak memberikan kontribusi sesuai kapasitasnya, baik dalam bentuk fasilitasi kegiatan, pendampingan, pelatihan, bantuan sarana, maupun pembukaan akses jaringan kerja sama.

Dalam perspektif Teori Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, proses pemberdayaan pada KTH Green Lawu telah mencerminkan pelaksanaan peran fasilitatif, edukasional, teknis, dan representatif. Peran

fasilitatif terlihat melalui dukungan sarana dan akses program, peran edukasional tampak pada kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota, peran teknis terlihat melalui bantuan pengembangan usaha produktif, sedangkan peran representatif tampak dalam upaya menjembatani hubungan kelompok dengan pihak luar.

Pemberdayaan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, terbukanya peluang ekonomi baru, penguatan hubungan sosial, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kawasan hutan. KTH Green Lawu juga berkembang menjadi wadah masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Namun demikian, pemberdayaan yang berlangsung belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian kelompok. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya ketergantungan terhadap stakeholder eksternal, keterbatasan sumber daya manusia, partisipasi anggota yang belum merata, serta penguatan kelembagaan yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, proses pemberdayaan KTH Green Lawu masih berada pada tahap *capacity building* dan belum sepenuhnya mencapai tahap *community control*. Kolaborasi berbagai pihak tetap penting, namun perlu diarahkan pada penguatan kapasitas internal kelompok agar mampu tumbuh menjadi organisasi masyarakat yang mandiri, adaptif, dan berkelanjutan.

Saran

1. *Stakeholder* diharapkan terus memperkuat sinergi dalam mendukung KTH Green Lawu, terutama melalui pendampingan yang berorientasi pada kemandirian kelompok, bukan hanya pemberian bantuan jangka pendek.
2. KTH Green Lawu diharapkan meningkatkan kapasitas organisasi, memperkuat partisipasi anggota, mendorong regenerasi generasi muda, serta mengembangkan inovasi usaha agar mampu bersaing dan bertahan secara mandiri.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengkaji pemberdayaan masyarakat berbasis kehutanan sosial, khususnya yang berkaitan dengan kolaborasi stakeholder, penguatan kelembagaan, dan keberlanjutan kelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amilah. (2024). Kontribusi Kelompok Tani Hutan Dalam Transformasi Sosial Dan Lingkungan Di Desa Karya Makmur Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten

Lampung Timur. *Ayaa*, 15(1), 37–48.
<https://core.ac.uk/download/pdf/609812990.pdf>

- Bahrani, Suhendang, Endang, Darusaman, Dudung, & Alikodra. (2007). Pendekatan Sistem dalam Pendugaan Nilai Ekonomi Total Ekosistem Hutan : Nilai Guna Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu A System Approach to Estimate Total Economic Value of Forest Ecosystem: Use Value of Timber and Non Timber Forest Products. *Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 4, 369–378.
- Bryson, J. ., Crosby, B. ., & Stone, M. . (2015). Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. *Public Administration Review*, 75, 153–164. <https://doi.org/10.29085/9781783302567.010>
- Gunawan, H., & Afriyanti, D. (2019). Potensi Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 13(2), 227. <https://doi.org/10.22146/jik.52442>
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Kualitaitaif pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 10(1), 74–79.
- Harahap, M. E. U. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. *De La Macca*, 1(1), 193–203.
- Hastari, B., Kehutanan, J., Pertanian, F., & Palangka, U. (2018). *4559-Libre*. 6(2), 145–153.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (S. Qudsy, Ed.). Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Lailia, I., Kismartini, & Rahman, A. Z. (2021). *Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang*.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2023). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook. *Experiencing Citizenship: Concepts and Models for Service-Learning in Political Science*, 109–118.
- Mekar Sari Eka Putri, Hery Bachrizal Tanjung, & Zul Irfan. (2023). Analisis Partisipasi Anggota Kelompok Tani Hutan Pada Kegiatan KTH Di Kota Padang. *Jurnal Niara*, 16(1), 132–148. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13953>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Muslim, A. (2017). Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 79–87. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v13i1.14524>

Romadhona, S. N. (2025). *The Role of Stakeholders in Empowering Smallholder Farmers in Kotabumi Utara Subdistrict , North Lampung Regency*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.